

Kebijakan impor garam (2004-2010): implikasi liberalisasi perdagangan terhadap sektor pergaraman nasional = Imported salt policies (2004-2010) : implication of trading liberalization to national salt sector

Intan Sari Boenarco, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20300588&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini mengangkat permasalahan yang bermula dari kisruh impor garam pada tahun 2011 lalu. Hal ini mengundang persepsi bahwa Indonesia belum mampu mengelola potensi kelautannya yang besar karena harus bergantung pada garam impor. Untuk itu, perlu digali mengenai faktor-faktor yang dapat menjelaskan penyebab ketidakmampuan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, analisa terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengantarkan kepada hasil bahwa pengembangan sektor pergaraman nasional terkendala oleh faktor-faktor internal seperti akses teknologi yang kurang dan proteksi pemerintah yang minim. Lebih dari itu, juga didasari kepada faktor liberalisasi perdagangan. Perdagangan bebas memungkinkan Indonesia untuk mengimpor dengan lebih mudah dan murah demi memenuhi kebutuhan garamnya. Lebih lagi, di tengah-tengah kampanye internasional untuk menggunakan garam beriodium yang masih sulit diproduksi di dalam negeri. Ini menjadi celah keuntungan bagi negara pengeksport garam seperti Australia dan para importir garam di dalam negeri. Pencarian kepentingan juga dilakukan oleh agensi transnasional yang diwakili oleh NGO dan pihak industri garam berskala besar terkait dengan kampanye tersebut. Namun ketika pamor garam berkurang karena terbukti memiliki efek samping bagi kesehatan, negara produsen garam tetap tak mau kehilangan pasarnya. Bagi Australia, Indonesia akan dipertahankan sebagai salah satu pasar garam yang potensial. Pertama, karena Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan garam sendiri. Kedua, karena tren gaya hidup sehat belumlah disadari penuh di Indonesia. Yang artinya, kebutuhan akan garam tidak akan berkurang. Untuk mengatasi segala kendala di sektor pergaraman, yang paling utama adalah perlunya keberpihakan pemerintah kepada ekonomi rakyat dengan proteksi dalam negeri melalui kebijakan yang tepat dan tegas. Inilah yang mengantarkan Indonesia pada keberhasilan program swasembada garam nasional.

<hr>

Abstract

Pro and Contra on Indonesian imported salt on 2011 is background of this thesis. Salt import issue rise a perception that Indonesia disabled to develop its abundant marine potential resources. So that, it is an urgent needs to study factors that make it disabled. Qualitative approach using descriptive analysis methode showing that disability in developing national salt sector caused by internal factors such as less of

protection and technology. Furthermore, disability is also caused by trading liberalization. Free trade make it easier and cheaper to importing salt to meet national salt demand. Furthermore, international campaign regarding important need to consume iodized salt that only produced in very limited amount in Indonesia make importing salt an instant way to be done. Importer agents, Non-governmental organization (NGO), Salt industrial companies and Salt exporters country such as Australia take this fortune opportunity to make a big profit income. In contrary when salt demand decrease because of health issue that give bad influence to human health, this particular opportunist parties does not want to loose their market. Facing this fact, Australian exporters still can maintain its market in Indonesia because lack of healthy awareness and lifestyle of its people. This means Indonesian salt demand is not decreasing. In years of 2004 Indonesian government rise imported salt policies, and instantly start salt sector liberalitation and meet its peak poin also in this year. In addition to minimum protection to national salt sector, this policies legalize imported salt and be a catalyst to emergence of importers in nation. In condition of high influence from global liberalization, there is no other solution to imported salt issue, that Indonesian government must put their concern to take side with people centered economic by protect nation salt production with precise and unequivocal policies. In the future, this policies can bring success in nation salt self-supporting program to meet national salt demand. .